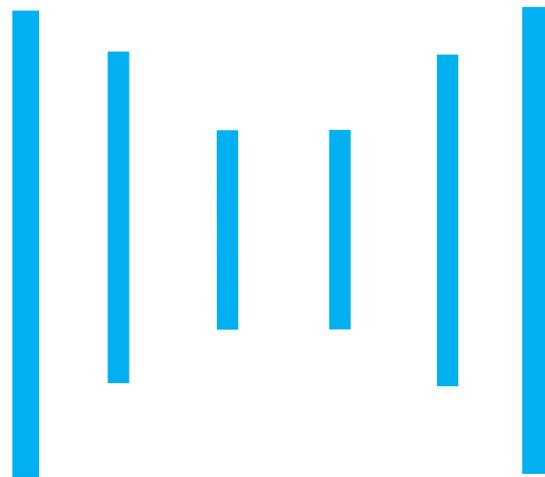




DOKUMEN RENCANA KERJA 2026



PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA**



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

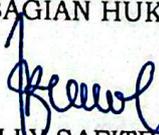
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat kami selesaikan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Bangka sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja OPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, dan dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menjalankan proses pembangunan daerah menuju Bangka yang lebih baik lagi.

Sungailiat, 8 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA**



SAPARUDIN, SE

NIP.196802102006041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	69
3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	84
BAB V PENUTUP.....	96
5.1. Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan.....	96
5.2. Kaidah Pelaksanaan	96
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Target Tujuan dan Indikator Tahun 2024

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Bangka

Tabel T.C30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026 Dinas
Perhubungan Kabupaten Bangka

Tabel 2.8 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025 Kabupaten Bangka

Tabel 3.2 Tabel Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka
Tahun 2026

Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2024-2026) dan merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun dengan memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka serta berpedoman kepada Renstra, RPD, serta RKPD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, karena memuat seluruh kebijakan publik khususnya perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, karena memuat arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, karena merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu Bupati Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan. Sesuai dengan Perbup Nomor 41 Tahun 2023, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41)
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk dijadikan : Sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah : Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RENJA Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Tahun Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 maupun capaian strategis dari perangkat daerah diarahkan pada pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. IKU dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka tahun 2024 sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai AKIP dengan satuan opini, dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).	Nilai	BB
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	Nilai Indeks dihitung dengan rumus : $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	Nilai	85
3.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persentase dihitung dengan rumus : $\frac{\sum \text{angkutan umum yang mengikuti uji Kelaikan}}{\sum \text{Kecelakan lalu lintas angkut jalan}} \times 100\%$	%	31 %

Dengan Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah Meningkatkan Pelayanan dan Keselamatan Transportasi dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Tabel 2.2
Target Tujuan dan Indikator Tujuan
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET	Ket
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB	
2.	Meningkatnya Konektivitas transportasi dalam daerah	Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,83	
3.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	30%	

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat diukur sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 dari 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sebanyak 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sementara 1 Sub kegiatan tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table di bawah ini

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI PENGGUNA ANGGARAN 2024			SISA ANGGARAN	
			FISIK	KEUANGAN			
		APBD/ DAK	%	Rp	%	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA	5.075.736.443,00	96,09	4.877.484.202,00	96,09	3,906	198.252.241,00
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	124.480.000,00	93,00	115.105.862,00	92,47	7,531	9.374.138,00
1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	74.480.000,00	92,00	67.745.862,00	90,96	9,042	6.734.138,00
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	50.000.000,00	98,00	47.360.000,00	94,72	5,28	2.640.000,00
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.702.894.000,00	100,00	3.612.450.107,00	97,56	2,443	90.443.893,00
1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.647.894.000,00	100,00	3.560.148.945,00	97,59	2,405	87.745.055,00
2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	20.000.000,00	90,00	17.731.162,00	88,66	11,34	2.268.838,00
3	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD</i>	35.000.000,00	100,00	34.570.000,00	98,77	1,229	430.000,00
3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	95,00	9.270.000,00	92,7	7,3	730.000,00
4	<i>Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	0	-	0	0	0	-
5	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	10.000.000,00	95,00	9.270.000,00	92,7	7,3	730.000,00
4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	116.607.858,00	68,00	78.958.337,00	67,71	32,29	37.649.521,00

6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.607.858,00	66,00	69.618.337,00	65,3	34,7	36.989.521,00
7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	95,00	9.340.000,00	93,4	6,6	660.000,00
5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.053.500,00	100,00	8.053.500,00	100	0	-
8	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.053.500,00	100,00	8.053.500,00	100	0	-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.411.085,00	100,00	943.189.876,00	97,5	2,504	24.221.209,00
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	796.501.596,00	100,00	775.496.748,00	97,36	2,637	21.004.848,00
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.362.865,00	100,00	89.726.528,00	97,15	2,854	2.636.337,00
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.546.624,00	100,00	77.966.600,00	99,26	0,738	580.024,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.290.000,00	80,00	110.456.520,00	75,51	24,49	35.833.480,00
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.690.000,00	85,00	108.946.520,00	80,29	19,71	26.743.480,00
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.600.000,00	15,00	1.510.000,00	14,25	85,75	9.090.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.311.551.175,00	100,00	5.246.685.930,00	98,78	1,221	64.865.245,00
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	4.935.419.530,00	100,00	4.894.481.646,00	99,17	0,829	40.937.884,00
14	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	100,00	159.454.000,00	99,66	0,341	546.000,00
15	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4.725.419.530,00	100,00	4.685.099.146,00	99,15	0,853	40.320.384,00
16	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50.000.000,00	100,00	49928500	99,86	0,143	71.500,00

9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.211.645,00	100,00	148.194.545,00	98,66	1,343	2.017.100,00
17	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	150.211.645,00	100,00	148.194.545,00	98,66	1,343	2.017.100,00
10	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	83.620.000,00	100,00	80.595.303,00	96,38	3,617	3.024.697,00
18	<i>Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</i>	83.620.000,00	100,00	80.595.303,00	96,38	3,617	3.024.697,00
11	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	42.300.000,00	78,00	32.729.900,00	77,38	22,62	9.570.100,00
19	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	30.000.000,00	90,00	26.159.900,00	87,2	12,8	3.840.100,00
20	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</i>	12.300.000,00	55,00	6.570.000,00	53,41	46,59	5.730.000,00
12	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100.000.000,00	100,00	90.684.536,00	90,68	9,315	9.315.464,00
21	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	100.000.000,00	100,00	90.684.536,00	90,68	9,315	9.315.464,00

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 tidak terdapat program/kegiatan sub kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja. Dari 2 program,12 kegiatan dan 22 sub kegiatan, rata-rata pencapaian kinerja keuangan sebesar 97 % dan fisik 97%, dari target awal 100% untuk pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024 pencapaian dari kinerja sasaran Meningkatnya Konektivitas Transporasi dalam Daerah dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas Kab/Kota yang dapat dilihat dari indakator sasaran yaitu rasio koentivitas kab/kota dengan target 0,83 dan realiasi 0.81 %.

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan **indikator kinerja Rasio Konektivitas Kab/Kota**, yaitu : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar 98%, dengan sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan hasil survei Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang diperoleh 85 % pada tahun 2024 dan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98%.

Pada tahun 2024 pencapaian dari kinerja sasaran Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator sasaran Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dapat dilihat dari indikator sasaran yaitu persentase ruas jalan yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan dengan target 30% dan realisasi yang di capai 33%.

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 1 program, 4 kegiatan 7 Sub Kegiatan dengan **indikator kinerja Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas**, yaitu : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,17% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar 96,38%, dengan sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik sebesar 78 % dan realisasi keuangan sebesar 77,30%, dengan sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin.

Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,69%, dengan sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Bangka

3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya/melebihi target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Jangka waktu antara perubahan anggaran dengan proses pelaksanaan anggaran yang sempit.
- Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Minimnya proses evaluasi yang untuk penyiapan dokumen dan pelaksanaan rencana perubahan pelaksanaan anggaran bagi sub-sub kegiatan yang dapat dinilai mengalami surplus anggaran.
- adanya perubahan peraturan berkaitan tentang pencairan SPPD di akhir tahun sehingga mempengaruhi proses pencairan.

4. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul dari target capaian program renstra dan perangkat daerah secara umum bersifat positif dimana program dan kegiatan Tahun 2024 memenuhi target, dimana kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 tingkat rata-rata capaian realiasi kinerja fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 98 %.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbaiki pemahaman, pemetaan, dan korelasi atas sasaran, tujuan, indeks kinerja, dan program Pemerintah Kabupaten dengan visi, misi, indeks kinerja umum maupun indeks kinerja individu, sasaran, tujuan, serta hasil kegiatan/sub kegiatan, sehingga diperoleh proses cascading kegiatan/sub kegiatan yang terarah, sinergis, dan optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
- Perbaiki proses survey dan alokasi anggaran dalam penyusunan RKA sehingga mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia.

- Mengoptimalkan pengendalian secara berkala melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran maupun capaian kinerja pegawai.
- Memaksimalkan pelaksanaan koordinasi internal di dalam membangun komunikasi, menyelaraskan langkah realisasi kegiatan, maupun penyerapan anggaran dan peningkatan efektifitas dan efesiensi kinerja.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui keterlibatan aktif dalam mengikuti diklat maupun bimtek.

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
(TAHUN BERJALAN) KABUPATEN BANGKA

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I				II				III				IV							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1		2 15	JRUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN		24,007,108,339		10,387,287,618		2,083,978,268		2,633,737,486		2,875,204,253		2,531,233,125		10,124,153,132		10,124,153,132		42.17						
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26.00	7,938,738,809	26.00	5,075,736,443	0.00	978,028,987	0.00	1,520,426,348	0.00	1,490,617,813	0.00	888,384,054	0.00	4,877,457,202	0.00	4,877,457,202	0.00	61.44					
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100						
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	68.00		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
	Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	2 15 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100	128,000,000	100	124,480,000	50.00	18,440,000	50.00	21,230,000	33.33	29,835,862	33.33	45,600,000	166.67	115,105,862	166.67	115,105,862.00	166.67	89.93					
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100		100		50.00		50.00		75.00		50.00		225.00		225.00		225.00						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 15 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	18	78,000,000.00	6	74,480,000	50.00	10,080,000	50.00	16,190,000	33.33	16,485,862	33.33	24,990,000	166.67	67,745,862	10	67,745,862	10	55.56	86.85				
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 15 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja yang disusun (dokumen)	12	50,000,000.00	4	50,000,000	50.00	8,360,000	50.00	5,040,000	75.00	13,360,000	50.00	20,610,000	225.00	47,360,000	9	47,360,000	9	75.00	94.72				

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2	15	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100	3,907,935,823			100	3,702,894,000	25.00		735,377,225	0.00		1,168,396,954	0.00		1,102,129,923	0.00		606,546,005	25.00		3,612,450,107	25.00	3,612,450,107	25.00	92.44
Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	3,852,935,823		12	3,647,894,000	25.00	3	727,017,225	25.00	3	1,163,356,954	25.00	3	1,080,928,761	25.00	3	588,846,005	100.00	12	3,560,148,944	12	3,560,148,944	33.33	92.40
Terlaksananya Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	15	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatbusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	20,000,000		2	20,000,000	0.00	0	-	0.00	0		100.00	2	17,281,162	100.00	2	450,000	200.00	4	17,731,162	4	17,731,162	66.67	88.66
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	15	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126	35,000,000		12	35,000,000	25	3	8,360,000	25.00	3	5,040,000	50.00	6	3,920,000	25.00	3	17,250,000	125.00	15	34,570,000	15	34,570,000	11.90	98.77

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2	15	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengengkapi Atribut Lengkap	100	103,750,000.00			100	10,000,000	25.00		3,840,000	0.00		-	0.00		300,000	0.00		5,130,000	25.00		9,270,000	25.00	9,270,000	25.00	8.93
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100		25.00					0.00						25.00		25.00		25.00		25.00	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50.00				12.50		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	15	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	9,750,000.00		1	-	0.00	0.00				-	0.00	0				0.00	0	0		0		0.00	0.00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	15	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	10,000,000		11	10,000,000	45.45	5	3,840,000	45.45	5	-	81.82	9	300,000.0	0.00		5,130,000	172.73	19	9,270,000	19	9,270,000	57.58	92.70
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	15	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	84,000,000		5	-	0.00	0.00				-	0.00	0				0.00	0	0		0		0.00	0.00
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2	15	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	420,570,000			100	116,607,858	25.00		34,898,402	0.00		18,680,000	0.00		21,887,935	0.00		3,492,000	25.00		78,958,337	25.00	78,958,337	25.00	18.77
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	15	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	360,570,000		36	106,607,858	25.00	9	29,568,402	25.00	9	16,220,000	25.00	9	20,787,935	0.00		3,042,000	75.00	27	69,618,333	27	69,618,333	75.00	19.31
	Terlaksananya Penatbusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	15	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatbusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatbusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	30,000,000		12	10,000,000	25.00	3	5,330,000	25.00	3	2,460,000	75.00	9	1,100,000	0.00		450,000	125.00	15	9,340,000	15	9,340,000	41.67	31.13

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	15	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	30,000,000			12	-	25.00	3	-	25.00	3	0.00			-	0.00			-	50.00	6		6		16.67	0.00
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	75.00	2,233,053,500			65.00	8,053,500	0.00		-	0.00		-	0.00			-	0.00		8,053,500	0.00		8,053,500	70.00	8,053,500	70.00	0.36
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	15	01	2	07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	800,000,000			0	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00			-	0.00		0.00	0		0		0.00	0.00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	900,000,000			0	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00			-	0.00		0.00	0		0		0.00	0.00	
Tersedianya Mebel	2	15	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	25,000,000			0	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00			-	0.00		0.00	0		0		0.00	0.00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	8,053,500			1	8,053,500	0.00	0.00	-	0.00	0		-	0.00			-	0.00		8,053,500	0.00	0	8,053,500	0.00	100.00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	15	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	#####	#####		0	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00			-	0.00		0.00	0		0		0.00	0.00	
Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	932,189,686.00			100	967,411,085	25.00		174,473,360	0.00		294,961,694	0.00		313,664,220	0.00		160,063,602	25.00		943,162,876	25.00	943,162,876	25.00	101.18	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	760,809,338.00			12	796,501,596	25.00	3	147,318,400	25.00	3	253,844,100	25.00	3	246,373,296	25.00	3	127,933,953	100.00	12	775,469,748	12	775,469,748	33.33	101.93	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	15	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	90,362,865.00			12	92,362,865	25.00	3	11,981,960	25.00	3	16,106,594	25.00	3	43,293,725	25.00	3	18,344,249	100.00	12	89,726,528	12	89,726,528	33.33	99.30
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	15	01	2	08	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	81,017,483.00			12	78,546,624	0.00	0	15,173,000	0.00	0	25,011,000	0.00	3	23,997,200	0.00	3	13,785,400	0.00	6	77,966,604	6	77,966,604	16.67	96.23
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	95.00	213,239,800			75.00	148,290,000	25.00		11,000,000	0.00		17,157,700	0.00		22,799,873	0.00		59,498,947	25.00		110,456,520	25.00	110,456,520	26.32	51.80
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	45.00	157,639,800			15	135,690,000	26.67	4	11,000,000	26.67	4	17,157,700	26.67	4	21,739,873	20.00	3	59,048,947	100.00	15	108,946,528	15	108,946,528	33.33	69.11
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	10,600,000			15	10,600,000	33.33	5		33.33	5	-	0.00		1,060,000	33.33	5	450,000	100.00	15	1,510,000	15	1,510,000	33.33	14.25
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	15	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45,000,000			0	-	0.00	0.00		0.00	0.00				-	0.00		0.00	0		0		0.00	0.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25.36		19.27	25.36	29.95	36.12	29.37	22.44	17.50	109.29	96.09			26.52	61.44												

										Predikat Kinerja																							
										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	SR	R								
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum	2	15	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	62.00	16,068,369,530	-	60.00	5,311,551,175	0.00	1,105,949,281	0.00	1,113,311,138	0.00	1,384,586,440	0.00	1,642,849,071	0.00	5,246,695,930	0.00	52,466,993	0.00	32.65			
	Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas										Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	75.00			70.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2000	5,435,219,530		1500	4,935,419,530	0.00	1,049,746,328	0.00	1,042,760,483	1600	1,302,413,350	0.00	1,499,571,285	1,600	4,894,491,646	0	4,894,491,646	0.00	90.05			
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan	2	15	02	2	02	0001			Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1560	160,000,000		16	160,000,000	0.00	0.00	0	0	0.00	100.00	16	159,464,000	100.00	16	159,464,000	16	159,464,000	1.03	99.67		
	Tersedianya Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0002			Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200	500,000,000		0	0.00	0.00	0	0	0.00			0.00	0		0		0.00	0.00				
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2	15	02	2	02	0003			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3242	4,725,419,530		3242	1,049,746,328	100.00	3242	1,042,760,483	0.00		1,292,173,550	0.00	1,300,418,785	200	6484	4,685,099,146	6484	4,685,099,146	200	99.15		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0004			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10,000	50,000,000		1	50,000,000	0.00	0.00	0	0	0.00		10,240,000	100.00	1	39,688,500	100.00	1	49,928,500	1	49,928,500	0.01	99.86
	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	2	15	02	2	03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	35.00	5,700,000,000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2	15	02	2	03	0001			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	200,000,000		0	0.00	0.00	0	0	0.00			0.00		0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
	Terbangunnya Gedung Terminal	2	15	02	2	03	0009			Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	5,000,000,000		0	0.00	0.00	0	0	0.00			0.00		0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	2	15	02	2	03	0011			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2	500,000,000		0	0.00	0.00	0	0	0.00			0.00		0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I				II				III								IV							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%	16																
	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2	15	02	2	04																									
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	04	0002																								
	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05																									

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05	0001	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	165,000,000			3	150,211,645	100	3,00	18,028,290	100,00	3,00	26,907,255	66,67	2	37,277,000	0,00		65,982,000	267	8	148,194,544	8	148,194,544	266,67	89,81	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	100,000,000			0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00			0,00			0,00	0	0			0,00	0,00	
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	2	15	02	2	05	0008	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	50,000,000			0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00			0,00			0,00	0	0			0,00	0,00	
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	15	02	2	06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	24	100,000,000			4	83,620,000	1		25,821,262	25,00		11,883,400	50,00			27,957,755	0,00		14,932,886	76,00		80,595,304	76,00	80,595,304	316,67	80,60
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	06	0001	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	100,000,000,00			4	83,620,000	25,00	1	25,821,262	25,00	1	11,883,400	50,00	2	27,957,755	0,00		14,932,886	100,00	4	80,595,304	4	80,595,304	33,33	80,60	
Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin	2	15	02	2	07		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	6	50,000,000			1	42,300,000	0,00		700,000	0,00		12,470,000	0,00			6,910,000	0,00		12,649,900	0,00		32,729,900	0,00	32,729,900	0,00	65,46
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	15	02	2	07	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	30,000,000			1	30,000,000	0,00	0,00	-	0,00	0	10,250,000	100,00	1	4,510,000	100,00	1	11,399,900	200,00	2	26,159,900	2	26,159,900	66,67	87,20	
Terawastinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2	15	02	2	07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	20,000,000			1	12,300,000	0,00	0,00	700,000	0,00	0	2,220,000	0,00		2,400,000	100,00	1	1,250,000	100,00	1	6,570,000	1	6,570,000	33,33	32,85	
Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	6,00	2,255,100,000,00			2,00	100,000,000	0,00		11,653,401	0,00		19,290,000	0,00			10,028,135	0,00		49,713,000	0,00		90,684,536	0,00	90,684,536	0,00	402
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2	15	02	2	08	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12	229,000,000,00			4	100,000,000	25,00	1	11,653,401	25,00	1	19,290,000	0,00			10,028,135	25,00	1	49,713,000	75	3	90,684,536	3	90,684,536	25,00	39,60
Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	2	15	02	2	09		Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia	41,00	1,513,050,000			0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00			-	0,00		-	0,00		-	0,00	0,00		

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	15	02	2	06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	36	513,050,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00			0		0.00	0.00		
Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum							Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	3	100,000,000			0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	3	100,000,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0		0.00	0.00	
Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum							Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	3	100,000,000			0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan							Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	3	100,000,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0		0.00	0.00	
Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum							Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan	3	100,000,000			0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	100,000,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0		0.00	0.00	
Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum							Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan	3	200,000,000			0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten							Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100,000,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0		0.00	0.00	
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten							Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	3	100,000,000			0.00		-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0		0.00	0.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										31.25	20.82	31.25	20.96	27.08	26.07	53.13	30.93	142.71	98.78		29.81	32.65						
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	ST		SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN										10,387,287,618	2,083,978,268		2,633,737,486		2,875,204,253		2,531,233,125		10,124,153,132		10,124,153,132							
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan (%)										28.31	20.06	28.31	25.36	31.60	27.68	37.78	24.37	126.00	97.47		28.16	47.05						
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST		SR	SR						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja tahun pertama untuk Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Indikator Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2024 target nya adalah 26, dan realisasi capaian sesuai target 100% .

Indikator nilai kinerja pelaporan dan perangkat daerah pada tahun 2024 dengan target 16, dan realisasi capaian sesuai target 100%.

Indikator Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Tahun 2024 dengan target 0 dan capaian sesuai target 100%.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan target 68% dan capaian sesuai target 100%.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan target 3 % dan capaian sesuai target 100%.

Indikator Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dengan target 100% dan capaian sesuai target 100%.

Indikator Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum Tahun 2024 dengan target 62 % wilayah yang terlayani angkutan umum dan capaian sesuai target 100%.

Indikator Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan tahun 2024 dengan target 75% dan capaian sesuai target 100%.

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah			26.00	27.00	28.00	29.00	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah			16.00	17.00	18.00	19.00	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI			0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			68.00	70.00	72.00	74.00	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah			3.00	4.00	4.00	5.00	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum			62%	66%	77%	78%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan			75%	80%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan pengembangan daerah dengan cukup baik. Namun, tentunya masih terus dilakukan evaluasi-evaluasi untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dengan lebih baik lagi. Mengingat adanya isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-Isu penting di daerah yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Dana yang ada sedangkan daerah yang harus dilayani belum sepenuhnya terpenuhi;
2. Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan yang telah dilakukan (misalnya adanya Pencurian Fasilitas PJU);
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai, dikarenakan belum bisa tersampaikan menyeluruh visi dan misi Dinas Perhubungan kepada pegawai.

Penentuan isu-isu strategis pada bagian ini didapat dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; maupun dari review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka pada periode sebelumnya. Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe C, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota, kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota. Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan saling berkoordinasi dan bersinergi dengan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam penyelenggaraan sub-sub kegiatannya. Sementara itu, Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan menyelenggarakan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data realisasi pendapatan retribusi kendaraan bermotor, diperoleh Isu Strategis yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pengguna angkutan barang untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor
2. Kurangnya penerangan jalan umum
3. Kurangnya ketersediaan angkutan umum dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan tingkat kinerja yang telah dicapai dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Secara umum tidak ada perubahan berarti terhadap program dan kegiatan yang diusulkan pada saat Rancangan RKPD 2024 dengan pada saat RKPD ditetapkan.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.00	9,585,000,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27.00	9,585,000,000.00	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17.00				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17.00		
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%		

			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70.00	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	255,000,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	255,000,000.00
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	

1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	155,000,000.00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	155,000,000.00
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000.00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4,905,000,000.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4,905,000,000.00

			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%				Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%		
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/bulan	4,800,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/bulan	4,800,000,000.00	
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	40,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	40,000,000.00	

2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 laporan	65,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 laporan	65,000,000.00	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%	325,000,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	50%	325,000,000.00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%				Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%		

3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000.00
3.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	25,000,000.00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	25,000,000.00
3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100,000,000.00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100,000,000.00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	375,000,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	375,000,000.00

			Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan	3%				Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan	3%		
4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275,000,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275,000,000.00	
4.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000.00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000.00	
4.3	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000.00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000.00	

5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	75%	1,390,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	75%	1,390,000,000.00	
5.1	sub pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Bangka	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000.00	sub pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Bangka	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000.00	
5.2	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>6 unit</i>	<i>100,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>6 unit</i>	<i>100,000,000.00</i>	
5.3	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>70 unit</i>	<i>120,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>70 unit</i>	<i>120,000,000.00</i>	
5.4	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>20 unit</i>	<i>120,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>20 unit</i>	<i>120,000,000.00</i>	

			<i>yang Disediakan</i>					<i>yang Disediakan</i>			
5.5	<i>sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>kab.bangka</i>	<i>jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>2 unit</i>	<i>550,000,000.00</i>	<i>sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>kab.bangka</i>	<i>jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>2 unit</i>	<i>550,000,000.00</i>	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,515,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,515,000,000.00	
6.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1,150,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1,150,000,000.00</i>	
6.2	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>160,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kab Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>160,000,000.00</i>	

6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	205,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	205,000,000.00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	85%	820,000,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	85%	820,000,000.00
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	475,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	475,000,000.00

7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	45,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	45,000,000.00	
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	300,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	300,000,000.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					

II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	66%	23,948,334,700.00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	66%	23,948,334,700.00
			Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	80%				Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	80%	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2000 Unit	20,770,334,700.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2000 Unit	20,770,334,700.00
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	1. APJ/LPJU (705 Unit)	10,920,334,700.00	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	1. APJ/LPJU (705 Unit)	10,920,334,700.00
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	100 unit	500,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	100 unit	500,000,000.00

1.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Bangka	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 Unit	9,000,000,000.00	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Bangka	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 Unit	9,000,000,000.00
1.4	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bangka	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 unit	350,000,000.00	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bangka	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 unit	350,000,000.00
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal yang tersedia		2,002,000,000.00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal yang tersedia		2,002,000,000.00
2.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	10,000,000.00	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	10,000,000.00
2.2	sub pembangunan gedung terminal	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	jumlah gedung terminal yang terbangun	2 unit	1,990,000,000.00	sub pembangunan gedung terminal	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	jumlah gedung terminal yang terbangun	2 unit	1,990,000,000.00

2.3	sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C	kab. Bangka	jumlah rencana pembangunan terminal tipe C yang tersusun		2,000,000.00	sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C	kab. Bangka	jumlah rencana pembangunan terminal tipe C yang tersusun		2,000,000.00
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Titik Parkir yang dikelola dengan baik	26 ruas	20,000,000.00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Titik Parkir yang dikelola dengan baik	26 ruas	20,000,000.00
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,000,000.00
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR	60%	536,000,000.00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR	60%	536,000,000.00

4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	3 unit	300,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	3 unit	300,000,000.00
4.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang	200,000,000.00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang	200,000,000.00
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dokumen		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dokumen	

4.4	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		
4.5	Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan		Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan		
4.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	3 unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	3 unit		

4.7	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	36,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	36,000,000.00
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	200,000,000.00	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	200,000,000.00
5.1	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	200,000,000.00	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	200,000,000.00

6	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kot a		Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun	1 dokumen	85,000,000.00	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kot a		Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun	1 dokumen	85,000,000.00
6.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	35,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	35,000,000.00
6.2	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	50,000,000.00	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	50,000,000.00
7	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 laporan	175,000,000.00	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 laporan	175,000,000.00

7.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	175,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	175,000,000.00
8	Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum yang tersedia	unit	50,000,000.00	Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum yang tersedia	unit	50,000,000.00

8.1	Sub Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	50,000,000.00	Sub Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	50,000,000.00
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan		10,000,000.00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan		10,000,000.00

9.1	<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>
10	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan</i>		<i>10,000,000.00</i>	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan</i>		<i>10,000,000.00</i>

10.1	Perumusan Kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Kabupaten/Kot a	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	10,000,000.00	Perumusan Kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Kabupaten/Kot a	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	10,000,000.00
11	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Bangka/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Penerbitan Izin Penyelnggaran Angkutan		30,000,000.00	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Bangka/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Penerbitan Izin Penyelnggaran Angkutan		30,000,000.00

11.1	<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik</i>	<i>1 unit</i>	<i>30,000,000.00</i>	<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik</i>	<i>1 unit</i>	<i>30,000,000.00</i>	
------	---	--	---	---------------	----------------------	---	--	---	---------------	----------------------	--

12	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kot a		jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/ kota		60,000,000.00	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kot a		jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/ kota		60,000,000.00
12.1	Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	30,000,000.00	Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	30,000,000.00

12.2	penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 dokumen	30,000,000.00	penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 dokumen	30,000,000.00
			TOTAL		33,533,334,700.00			TOTAL		33,533,334,700.00

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Berkenaan dengan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat, tidak ada program/kegiatan masyarakat yang diusulkan ke Inspektorat Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2025. Usulan masyarakat melalui Pokir Dewan untuk Tahun 2025, Sebagian besar adalah permintaan pemasangan baru PJU dan pemeliharaan PJU lama, di jalan lingkungan serta jalan kabupaten, antara lain:

Tabel 2.8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025 KABUPATEN BANGLA

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/VOLUM		CATATAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
1	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan lubuk kelik kecamatan sungailiat, Kab. Bangka	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	55	Buah	Adanya masyarakat mengajukan penerangan lampu jalan di lingkungan lubuk kelik jalan gajah mada rt 03 dan jalan bukit intan
2	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Komplek pepabri kelurahan lubuk kelik kecamatan sungailiat , Kab. Bangka		20	Buah	Adanya ajuan dari masyarakat lubuk kelik pematangan lampu jalan di rt 04 dan rt 05 komplek pepabri kelurahan lubuk kelik
3	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan jelitik kecamatan merawang, Kab. Bangka		43	Buah	Adanya ajuan masyarakat rambak mengajukan lampu penerangan jalan dan pembuatan drainase di jalan bintang ,bulan,zoehri dan aneka di kelurahan jelitik

4	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan jelitik kecamatan sungailiat, Kab. Bangka		10	Buah	Adanya ajuan masyarakat lingkungan rambak mengajukan pemasangan lampu penerang jalan ppn dan lingkungan rambak sampai pelabuhan kelurahan jelitik
5	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan rambak kelurahan jelitik kecamatan sungailiat, Kab. Bangka		10	Buah	Adanya ajuan masyarakat lingkungan rambak mengajukan lampu penerangan jalan di madrasah alsayifi jalan bintang (icon kampung santri)kelurahan jelitik
6	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan teluk uber kelurahan jelitik kecamatan sungailiat, Kab. Bangka		10	Buah	Adanya ajuan masyarakat lingkungan teluk uber mengajukan pemasangan lampu jalan rt 002 di lingkungan teluk uber kelurahan jelitik
7	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan lubuk kelik kecamatan sungailiat, Kab. Bangka		57	Buah	Adanya ajuan masyarakat lubuk kelik mengajukan pemasangan lampu penerang jalan di rt 01,rt 02 rt 07 dan rt 08 di kelurahan lubuk kelik
8	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	JALAN KARANG PANJANG KENANGA, SUNGAILIAT, Kab. Bangka		1	PAKET	PEMASANGAN PENERANGAN LAMPU JALAN SEPANJANG JALAN KARANG PANJANG SAMPAI KENANGA PERMAI, SUNGAILIAT

9	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	MATRAS, SUNGAILIAT, Kab. Bangka		1	PAKET	Penerangan jalan dimana masih ada lampu yang mati walaupun sebelumnya sudah pernah di perbaiki tapi masih ada sebagian lampu yang belum di perbaiki, dan di titik-titik tertentu yang rawan kejahatan belum di pasang lampu penerangan dimana pihak pemasang tidak tepat sasaran pada titik rawan tersebut.
10	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Dusun puntik desa mapur kecamatan riau silip, Kab. Bangka		1300	Watt	Adanya ajuan masyarakat dusun puntik subsidi lampu di masjid desa mapur
11	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DUSUN AIR PON , GUNUNG MUDA, BELINYU, Kab. Bangka		1	PAKET	PENERANGAN JALAN DUSUN AIR PON
12	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DUSUN RAMBANG, DESA BERBURA, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	USULAN LAMPU PENERANGAN JALAN DI DUSUN RAMBANG
13	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DESA BERBURA, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	USULAN LAMPU PENERANGAN JALAN
14	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DESA BANYU ASIN, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	USULAN LAMPU PENERANGAN JALAN DEKAT PERSAWAHAN
15	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa cit kecamatan riau silip, Kab. Bangka		10	Buah	Adanya ajuan masyarakat desa cit lampu penerangan jalan di gang kantor desa

16	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	GANG DUSUN I RT 04, DESA BANYU ASIN, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	PERBAIKAN LAMPU JALAN GANG DUSUN I RT 04
17	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	GANG DUSUN I RT 02, DESA BANYUASIN, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	USULAN LAMPU JALAN GANG DUSUN I RT 02
18	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DESA GUNUNG MUDA, BELINYU, Kab. Bangka		1	PAKET	PENERANGAN LAMPU JALAN
19	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	JALAN KAMPUNG BULUH, BELINYU, Kab. Bangka		1	PAKET	MASYARAKAT Menginginkan jalan di daerah tersebut agar secepatnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk pembangunan lampu penerangan jalan dan perbaikan jalan, karena selama ini hanya mengandalkan dana swadaya masyarakat untuk perbaikan dan pembangunan jalan di daerah tersebut.
20	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	DESA PUGUL, RIAU SILIP, Kab. Bangka		1	PAKET	PENERANGAN LAMPU JALAN
21	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	SIMPANG TIGA SD NEGERI PARIT 14, DESA BINTET BELINYU, Kab. Bangka		1	UNIT	PERMASALAHAN DI PERTIGAAN PARIT 14 MENUJU PARIT 19
22	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa cit kecamatan riau silip, Kab. Bangka		10	Titik	Adanya ajauan pemasang lampu di jalan bonglijan dusun cit desa cit kecamatan riau silip

23	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa tiang tarah kecamatan bakam, Kab. Bangka		20	Titik	Adanya masyarakat tiang tarah mengajukan penerangan lampu jalab di sekolah dan sepanjang jalan dan mengharapkan program memperbaiki lapangan bola di tahun 2024 dan tahun 2025 dan ada juga permasalahan kabel yang sudah banyak turun di sepanjang jalan
24	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa tiang tarah kecamatan bakam, Kab. Bangka		10	Meter	Adanya masyarakat tiang tarah mengusulkan pembuatan vita kejut untuk menghindari kecelakaab
25	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa tiang tarah kecamatan bakam, Kab. Bangka		15	Unit	Adanya ajuan masyarakat tiang tarah mengusulkan lampu penerangan jalan
26	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jalan Desa saing, Kab. Bangka		1	paket	jalan yang Gelap dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan tindak kejahatan
27	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jalan Srikandi Rt.03 dan Rt.07 Desa Sempan Kecamatan Pemali, Kab. Bangka		8	titik	Akibat jalan gelap sering terjadinya kecelakaan dan tindak kejahatan
28	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Simpang tiga Pemali Kecamatan Pemali, Kab. Bangka		1	paket	Sering terjadi kecelakaan
29	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Hakok Kelurahan Matras, Kab. Bangka		1	paket	Belum adanya lampu penerangan jalan dan untuk menghindari tingkat kejahatan

30	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Rt. 01 dan Rt. 02 Lingkungan 6 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu, Kab. Bangka		1	paket	Kurangnya lampu penerangan jalan
31	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Rt.02 Lingkungan VI Jalan Kusam Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu, Kab. Bangka		1	paket	Jalan yang gelap dan untuk mengurangi tingkat kejahatan
32	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Gang Sadar dan Gang Demang, Kel Belinyu, Lingkungan Sungai Ketok, Kab. Bangka		10	Unit	Reses Romlan, SH tgl 9 Februari 2024, usulan Pemasangan Lampu Jalan Umum di Gang Sadar dan Gang Damang sekitar 10 titik sepanjang jalan menuju perkuburan utk membantu aktivitas pengamanan lingkungan di malam hari
33	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Balunijuk, Kab. Bangka		10	titik	Pemasangan lampu penerangan jalan
34	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Kimak, Kab. Bangka		20	titik	pengajuan lampu jalan dikarenakan banyak lampu yang mati atau tidak nyala lagi.
35	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Parit Pekir RT 05, Kab. Bangka		1	paket	Lampu sudah terpasang belum menyalah
36	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Cendrawasih IV RT 03, Kab. Bangka		10	titik	Pemasangan lampu jalan

37	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	sepanjang jalan di desa bokor kec pemali, Kab. Bangka		4	Unit	Reses Ruswanto, A.Md,Pjk tgl 9 Februari 2024, usulan pengajuan lampu jalan umum di desa bokor kec pemali
38	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Jelitik RT 06, Kab. Bangka		5	titik	Pemasangan Lampu Jalan
39	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jalan Sri Menanti, KECAMATAN Sungailiat, Kab. Bangka		10	Unit	Reses Rendra Basri, B.SC, tgl 9 Februari 2024, usulan Bapak Ishar warga Sri Menanti menyampaikan ada beberapa lampu penerangan jalan yg sudah rusak, agar diperbaiki
40	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Parit Padang RT 11, Kab. Bangka		8	titik	Pemasangan Lampu Jalan
41	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan Jalan Timah Raya, Kab. Bangka		10	titik	pemasangan Lampu jalan
42	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Dusun 7 Pon Pasir Desa Penagan, Kab. Bangka		800	meter	Reses Muhammad Ali, tgl 9 Februari 2024, usulan untuk dibangun pagar pembatas jalan terhadap jalan jalan yang telah diaspal di Dusun 7 Pon Pasir Desa Penagan
43	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	dusun pon pasir desa penagan, Kab. Bangka		3	Unit	Reses Muhammad Ali, tgl 9 Februari 2024, usulan pemasangan lampu jalan di 3 titik di dusun pon pasir desa penagan
44	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Tiang Tara, Kab. Bangka		30	titik	Pemasangan baru lampu jalan

45	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Tiang Tarah, Kab. Bangka		10	titik	Pemansan lampu jalan
46	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	GG. Hayati Desa Kace Timur, Kab. Bangka		10	unit	pemasangan lampu jalan dari gg. hayati tembus ke bangka tengah
47	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jl. Masjid As-salam Gg. Makmur 1 Desa Kace, Kab. Bangka		7	titik	membangun tiang PLN
48	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jl. Masjid As-salam Gg. Makmur 1 Desa Kace, Kab. Bangka		4	titik	pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan disaat malam hari
49	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Surya Timur, Kab. Bangka		5	titik	pemasangan lampu jalan menuju GOR Kel. Surya Timur
50	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	RT. 04 Bideng Ake, Kab. Bangka		6	titik	Pemasangan Lampu Jalan dikarenakan jalan minimnya penerangan
51	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	desa air buluh kec.mendo barat, Kab. Bangka		15	titik	karena sering terjadi kecelakaan
52	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	desa labuh air pandan kec.mendo barat, Kab. Bangka		15	titik	karena sering terjadi kecelakaan dan menghindar hal yang tidak diinginkan
53	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	gang air jek Desa Riau Kec.Riau Silip, Kab. Bangka		10	titik	perbaiki lampu jalan yang sering mati
54	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jalan perumnas kelurahan kuto panji kec.belinyu, Kab. Bangka		500	meter	karena bola sering menyebrang kejalan raya
55	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	RT. 06, RT. 07, RT. 10, RT. 12 dan RT 14 Desa Nibung, Puding besar, Kab. Bangka		1	paket	permohonan agar dapat merealisasikan pemasangan jaringan listrik dan lampu jalan

56	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jl.mayor safrie rachman batu tunu, Kab. Bangka		15	titik	sehingga tidak terlampaui gelap ketika melewati jalan tersebut
57	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	UPTD SDN 6 Puding Besar, Kab. Bangka		1	paket	guna mendukung aktifitas dan sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu akan aktifitas warga sekitar dan banyaknya binatang ternak disekitar sekolah milik warga dan menghindari siswa sering bermain di tepi jalan umum yang dapat membahayakan keselamatan para siswa
58	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Sungai Bolo Kel. Air Asam Kec.Belinyu, Kab. Bangka		20	titik	memudahkan aktivitas masyarakat
59	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jalan Air Asam Kel. Air Asam kec.Belinyu, Kab. Bangka		200	meter	karena bola sering nyeberang kejalan raya
60	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jln. Singkep dan Gg. Sambu 1 dan GG. Sambu 2 Desa Air Ruay Kecamatan Pemali, Kab. Bangka		1	paket	Jalan gelap untuk menghindari kecelakaan
61	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Gg. Sambu II Desa Air Ruay Kecamatan Pemali, Kab. Bangka		1	paket	Sering terjadi kecelakaan
62	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jalan kimhin Kel.Surya timur Lingkungan Pramuka Kec.Sungailiat, Kab. Bangka		15	titik	Jika malam hari sangat bahaya gelap,sangat bahaya bagi pejalan kaki atau berkendara jalannya sudah banyak berlobang

63	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jalan samping vihara yaitu jl.brunai rebo kel.Surya Timur Kec.Sungailiat, Kab. Bangka		15	titik	Sangat Berbahaya Bagi berkendara Apalagi musim hujan
64	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jalan utama dari perkuburan cina kel. Surya Timur kec .Sungailiat, Kab. Bangka		15	titik	sangat gelap dan rawan kecelakaan
65	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	jalan azizah Kel.parot lalang Kec.sungailiat, Kab. Bangka		15	titik	menghindar dari hal hal yang tidak diinginkan
66	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Parit Padang KEC. Sungailiat, Kab. Bangka		15	titik	Penambahan lampu jalan
67	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan 1 kelurahan bukit ketok, Kab. Bangka		10	titik	Lampu jalan yang sudah di usulkan 10 titik tpi belum terealisasi sama sekali
68	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan 1 kelurahan bukit ketok, Kab. Bangka		3	titik	penerangan di depan masjid baitul iman dikarenakan merupakan tempat ibadah.
69	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan 1 Kecamatan Bukit Ketok, Kab. Bangka		1	paket	masalah tiang indihome yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, harap dibantu proses pencabutan tiang tersebut. lokasi tiang di jalan simpang dekat masjid sebelah rumah sdr. sofian mahadir
70	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan 3, bukit ketok, Kab. Bangka		10	titik	masalah lampu jalan yg sudah diajukan tapi belum direalisasi.

71	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa kunyang , bukit ketok, Kab. Bangka		5	titik	lampu jalan sudah terpasang 5 titik tapi semua lampu jalan mati hanya 1 yang masih hidup
72	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Lingkungan 4 kel. bukit ketok, Kab. Bangka		5	titik	lampu jalan yang belum terpasang
73	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	kampung bantam, bukit ketok, Kab. Bangka		4	km	lampu jalan yang sudah diusulkan tapi belum terealisasi sepanjang 4 km
74	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jalan Pagarawan Kecamatan Merawang, Kab. Bangka		20	titik	Terdapat aspirasi dari masyarakat utk permohonan Pemasangan lampu jalan umum di tiap tiap gang pada sepanjang jalan pagarawan, dikarenakan utk meningkatkan keamanan warga sekitar
75	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	RT. 008 Dusun Mulakarya, Kab. Bangka		10	titik	jalan yang gelap rawan tindak kejahatan
76	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Jln. Raya belinyu (jalan Nasional), Kab. Bangka		10	titik	terkait lampu jalan yang sudah terpasang 14 titik dari usulan 24 titik jdi masih kurang sebanyak 10 titik
77	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Simpang Matras menuju Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka		1	paket	lampu Jalan sudah ada tetapi tidak pernah dinyalakan dan jalan dari simpang Matras ke Lingkungan Hakok gelap
78	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Komplek Nangnung Selatan Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka		1	paket	Jalan gelap dan sering terjadi transaksi narkoba

79	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan sungailiat , Kab. Bangka		2	Unit	Adanya ajuan masyarakat terkait pemasangan rambu-rambu lalu lintas di depan yayasan asyifaal Qulub karena di yayasan tersebut banyak anak-anak.
80	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Puding Besar , Kab. Bangka		5	Unit	Adanya ajuan masyarakat puding Besar terkait pemasangan lampu jalan dari belakang SMPN 1 Puding Besar menuju RSUD Sjafrie rachamn
81	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar , Kab. Bangka		15	Unit	Adanya ajuan masyarakat desa Tanah Bawah terkait pemasangan lampu PJU lingkaran desa
82	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Kuto Panji , Kab. Bangka		5	Unit	Adanya ajuan masyarakat Kelurahan Kuto Panji terkait pemasangan lampu jalan pasir lingkungan 5
83	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA	Desa Gunung Pelawan kecamatan belinyu , Kab. Bangka		10	Batang	Adanya ajuan masyarakat parit 14 terkait pengajuan tiang listrik desa Gunung Pelawan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perhubungan mendukung program pembangunan nasional dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa cara Dinas Perhubungan berkontribusi:

1. **Pengembangan Infrastruktur Transportasi:** Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Ini penting untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antar daerah.
2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi:** Dinas Perhubungan bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, termasuk bus, kereta api, dan angkutan laut. Ini mencakup peningkatan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi transportasi.
3. **Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas:** Dinas Perhubungan mengatur dan mengawasi lalu lintas untuk memastikan kelancaran dan keselamatan di jalan raya. Ini termasuk pengaturan rambu lalu lintas, pengawasan kendaraan, dan penegakan aturan lalu lintas.
4. **Pengembangan Transportasi Berkelanjutan:** Dinas Perhubungan mendukung program transportasi berkelanjutan dengan mempromosikan penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda dan kendaraan listrik. Ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Dinas Perhubungan juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi melalui pelatihan dan pendidikan. Ini penting untuk memastikan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dalam mendukung pembangunan transportasi

Pembangunan Kabupaten Bangka pada periode pertama dalam RPJPD diarahkan untuk Penguatan Pondasi Pembangunan. Prinsip transformasi sebagaimana diusung dalam misi RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2045 pada tahapan pertama (2025 – 2029) ini adalah pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan ekosistem pendorong perekonomian, peningkatan kelembagaan tepat fungsi dan kapabilitas ASN, penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat

kriminalitas, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA RPJPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2045 V-5 peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan hingga level desa, peningkatan pemerataan infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa, dan peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah.

Adapun penentuan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam mendukung Transformasi ekonomi dilakukan melalui upaya penguatan ekosistem sektor non pertambangan, Pengembangan pariwisata ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang meliputi akses dan akomodasi.

Selanjutnya, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang difokuskan pada pemerataan infrastruktur hingga ke level desa guna mendukung kemandirian. Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Dari sarana transportasi dan perhubungan, terpenuhinya pembangunan jalan, jembatan, serta simpul-simpul transportasi.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 telah dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam mendukung kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah :

1. Meningkatnya Konektivitas Transporasi Dalam Daerah
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan darat.
3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 telah dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah Meningkatnya Pembangunan infrastruktur perhubungan dan Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah :

1. Meningkatnya Konektivitas Transporasi Dalam Daerah
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan darat.
3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.

Berikut rumusan tujuan Perangkat Daerah berdasarkan hasil mapping

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2022)
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Perhubungan $\{\sqrt{(RxV/C)}\}$	0,37	0,39	0,40	0,42	0,42
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi dalam Daerah	Ratio Konektivitas Transportasi	0,8	0,83	0,86	0,89	0,89
		Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas angkutan darat	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	26 %	30 %	50 %	70 %	29 %
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (70,18)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	B (66,94)

3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2026

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka yang direncanakan dalam Belanja Langsung Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah mengalami perubahan sehubungan dengan penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020, terdiri dari 2 program, 19 kegiatan, dan 47 sub kegiatan. Program dan kegiatan rencana kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		27,00	10.065.000.000,00	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		17,00		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%		
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		70,00		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		4		

		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%		
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	295.000.000,00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%		
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	18 Dokumen	180.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	1 Laporan	115.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		100%	4.920.000.000,00	
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar		100%		
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	39 orang/bulan	4.800.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	12 dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2.15.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	Kab. Bangka	5 laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi		50%	380.000.000,00	APBD
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%		
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%		
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	410.000.000,00	
		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan		3%		

2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		75%	1.380.000.000,00	
2.15.01.2.07.0001	sub pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Bangka	1 unit	-	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab Bangka	5 unit	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Bangka	1 unit	230.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Bangka	15 unit	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.07.0009	sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	kab.bangka	1 unit	600.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	1.710.000.000,00	
2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bangka	12 Laporan	1.300.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Bangka	12 Laporan	175.000.000,00	Dana Alokasi Umum

2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Bangka	12 Laporan	235.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		85%	970.000.000,00	
2.115.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Bangka	25 unit	625.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.115.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Bangka	45 unit	45.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.115.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Bangka	1 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum		66%	24.604.124.000,00	
		Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan		80%		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan		1500 Unit	18.803.024.000,00	
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Bangka	apj/lpju (130 unit)	6.850.000.000,00	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA

						TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bangka	50 unit	250.000.000,00	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Bangka	4077	10.000.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Bangka	1unit	1.703.024.000,00	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang tersedia			4.500.000.000,00	
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	1 unit	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.03.0009	sub pembangunan gedung terminal	jumlah gedung terminal yang terbangun	Kec. Sungailiat dan Kec. Belinyu	1 unit	2.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2.15.02.2.03.0001	<i>sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C</i>	<i>jumlah rencana pembangunan terminal tipe C yang tersusun</i>	<i>kab. Bangka</i>		-	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Parkir yang dikelola dengan baik		26 ruas	30.000.000,00	
2.15.02.2.04.0002	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR		60%	539.600.000,00	
2.15.02.2.05.0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>12 unit</i>	<i>400.000.000,00</i>	<i>PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA</i>

2.15.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	100.000.000,00	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	-	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.05.0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.05.0006	Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	-	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.05.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39.600.000,00	PAJAK PENERANGAN JALAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	250.000.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	1 laporan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun		1 dokumen	93.500.000,00	

2.15.02.2.07.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	38.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		1 laporan	200.000.000,00	
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kali	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang tersedia		unit	140.000.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Sub Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota yang tersedia	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2.15.02.2.11	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan</i>			2.000.000,00	
2.15.02.2.11.0001	<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	1 dokumen	2.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.12	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan</i>			11.000.000,00	
2.15.02.2.12.0001	<i>Perumusan Kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	1 dokumen	11.000.000,00	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.14	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Bangka/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan</i>			35.000.000,00	

2.15.02.2.14.0003	<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>
2.15.02.2.16	<i>Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota</i>	<i>jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>			-	
2.15.02.2.16.0001	<i>Analisis tarif kelas ekonomi angkutan angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota</i>	<i>jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	<i>Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>		-	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>

2.15.02.2.16.0002	penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		TOTAL			34.669.124.000,00	-

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026, terdapat 2 Program 19 Kegiatan 47 Sub Kegiatan yang mengacu pada aturan Kepmendagri 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. **11.645.656.664,00** Dari program,kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksud beberapa diantaranya adalah guna mengatasi beberapa isue strategis sebagaimana telah di bahas di bab III.

Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dinas Perhubungan			11,645,656,664.00							24,355,000,000.00	
	2	JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11,645,656,664.00							24,355,000,000.00	
	2	15	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		11,645,656,664.00							24,355,000,000.00	
1	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	28 18 0 72 4 100 %	5,424,301,336.00				-	9,490,000,000.00	

	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar, Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	6,034,750.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	100,000,000.00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	6,034,750.00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	4,544,489,085.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	6,115,000,000.00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4,535,793,945.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		6,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,454,250.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	6,240,890.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap, Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian, Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	49,138,150.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	545,000,000.00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9,750,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4,388,150.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	35,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	137,785,560.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	300,000,000.00			
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137,785,560.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	75 %	7,143,750.00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	45,000,000.00		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	7,143,750.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	356,620,041.00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	1,715,000,000.00		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	244,383,797.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		1,300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	15	01	2.08	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		180,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,236,244.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		235,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	85 %	323,090,000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan	-	670,000,000.00	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	256,490,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		525,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	10,600,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	56,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	Dinas Perhubungan		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	77 % 85 %	6,221,355,328.00					-	14,865,000,000.00			
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	1500 unit	5,777,355,328.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	14,000,000,000.00		
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	210,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	2,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4077 Unit	5,567,355,328.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	12,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	85 %	144,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	150,000,000.00	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	1 Unit	144,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		150,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	99 %	110,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	320,000,000.00	
	2	15	02	2.05	0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2000 Unit	88,850,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	21,150,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		120,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Laporan	80,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	250,000,000.00	
	2	15	02	2.06	0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	80,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)			
1	2	15	02	2.07	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	1 Dokumen	30,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	45,000,000.00		
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	1 Laporan	80,000,000.00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat	-	100,000,000.00		
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
								Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupaten)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	80,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H					11,645,656,664.00							24,355,000,000.00	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2026 secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Diperhatikan

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- Kualitas dokumen perencanaan Dinas Perhubungan perlu terus diperbaiki dan diselaraskan dengan RPD Kabupaten Bangka, Renstra OPD, maupun dokumen perencanaan lainnya.
- Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur perlu ditingkatkan.
- Monitoring, penilaian dan evaluasi kinerja SDM perlu ditingkatkan agar selaras dengan upaya pencapaian target kinerja OPD.
- Perlu mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan.

Renja Dinas Perhubungan OPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Infastruktur Perhubungan Rancangan Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan dan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif yang besar terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan meliputi langkah-langkah penetapan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan sangatlah penting. Untuk itu diharapkan Rencana Kerja OPD Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pembangunan disegala bidang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan adalah sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bangka untuk menilai Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka 2024-2026.
- Perbaiki pemahaman, pemetaan, dan korelasi atas tujuan dan sasaran, indeks kinerja, dan program Pemerintah Kabupaten dengan visi, misi, indeks kinerja umum maupun indeks kinerja individu, sasaran, tujuan, serta hasil kegiatan/sub kegiatan, sehingga diperoleh proses cascading kegiatan/sub kegiatan yang terarah, sinergis, dan optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
- Perbaiki proses survey dan alokasi anggaran dalam penyusunan RKA sehingga mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia.
- Mengoptimalkan pengendalian secara berkala melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran maupun capaian kinerja pegawai.
- Memaksimalkan pelaksanaan koordinasi internal di dalam membangun komunikasi, menyelaraskan langkah realisasi kegiatan, maupun penyerapan anggaran dan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui keterlibatan aktif dalam mengikuti diklat maupun bimtek.
- Mengajukan usulan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur. (***)

LAMPIRAN

**VERIFIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	Program, Kegiatan	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	satuan	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 DI RENSTR A PD	TARGET DI P- RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		60	62		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		BB (71,00)	76 (BB)	76 (BB)	76 (BB)
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)		26	28	28	28
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)		16	18	18	18
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%	0%		0%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	%	62,00	64	70%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	%	55,00%	55,56%	100%	100%
		Meningkatnya Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	%	70	75	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	%	65%	75%	70%	75%
		Meningkatnya efektivitas organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	%	0	0	0	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	Persentase Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	%	50%	60%		

		Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	%				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	95%	85%	80%	85%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum	Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	%	0%	60%	66%	77%
		Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	%		70%	80%	88%
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	% Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	%	0	85%	35%	85%
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	%	0%	100%		
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	dokumen	0	1	1	

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan	%	0	12 bulan	12 bulan	
Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan	na	0	na	2 dokumen	
Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia	unit	0	100%	1 unit	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	85%	100%	2000 unit	1500 unit
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	%	100%	100%	99%	99%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100%	100%	1 laporan	1 laporan

	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	dokumen	1	1	1	1
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	dokumen	1	1	1	1
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola	titik	0	0	2	2

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA**



SAPARUDIN, SE
NIP.196802102006041004

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024 - Minggu I Februari 2025	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2024	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2025		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	14-25 Januari 2025		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	3-13 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	14 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	17-28 Februari 2025		Seluruh PD
8	Input Rancangan Renja PD ke SIPD	17 Februari - 7 Maret 2025	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda	Input Rancangan Renja PD ke SIPD
9	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25-27 Februari 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	10-14 Maret 2025		Bappeda dan Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	9 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir Renja PD	9 Juli 2025		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	10-15 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaiki oleh PD	16-23 Juli 2025	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD

15	Reviu Ranhir Renja PD oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut oleh PD	24 Juli-5 Agustus 2025		Inspektorat dan Seluruh PD
16	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	6-7 Agustus 2025		Bappeda
17	Penetapan Renja PD melalui Perbup	8 Agustus 2025	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1308 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka

Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);

17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
- c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta menetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

B. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/1308/BAPPEDA/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sri Yulisafildiana, S.AP	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sufandi, A.Md	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ikhsan Arfani	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Urban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Urban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Urban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Urban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Urban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota

6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris

4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris

4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Ervin Septiawan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Rizki Amiliasari	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Yusnila Sari, S.Si	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Sulfiana, S.AB	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
-----	---------	---------------------

1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua

3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan/Angga Hidayatullah Eza, S.Si	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota

7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
-----	---------	---------------------

1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Suharpin	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Meggi	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Uci Oktariza	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Novela Sumalia	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Misleni Indah Purwati	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR

